SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI KOTA JAKARTA TIMUR

Rahel
NPP. 33.0360
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: rahelclaret@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab. SH, MH
Email: abdul@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement : *The author focuses on the suboptimal synergy between the Civil Service Police Unit (Satuan Polisi Pamong Praja) and the Social Service Office in the development of neglected children in East Jakarta. This condition is indicated by limited inter-agency coordination, less effective communication in the implementation of development programs, as well as constraints in human resources and supporting infrastructure for integrated handling of neglected children. Meanwhile, the handling of neglected children is an important part of realizing public order and social protection as regulated in Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 8 of 2007 concerning Public Order.* ***Objective:*** *The objective of this study is to examine the synergy between the Civil Service Police Unit and the Social Service Office in the development of neglected children in East Jakarta.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The analysis is conducted based on Doctoroff's synergy theory. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation.* ***Findings:*** *The findings show that the synergy between the Civil Service Police Unit and the Social Service Office in the development of neglected children in East Jakarta has been implemented in several aspects. In the coordination aspect, both agencies have collaborated in enforcement operations and field outreach for neglected children; however, communication between the two institutions is still not fully effective. In the implementation aspect, development activities have been carried out through referrals to social institutions and initial rehabilitation, but they have not yet been conducted in a sustainable manner. Meanwhile, in the resource aspect, limitations in personnel as well as facilities and infrastructure remain the main obstacles in supporting the effectiveness of inter-agency synergy.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the synergy between the Civil Service Police Unit and the Social Service Office in the development of neglected children in East Jakarta is not yet optimal.*

Keywords: *Neglected Children; Public Order; Civil Service Police Unit; Social Service Office; Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulis berfokus pada masih belum optimalnya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum maksimalnya komunikasi dalam pelaksanaan program pembinaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan penanganan anak terlantar secara terpadu. Padahal, penanganan anak terlantar merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan terhadap sinergitas berdasarkan teori Doctoroff. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur telah berjalan pada beberapa aspek. Pada aspek koordinasi, kedua instansi telah melakukan kerja sama dalam kegiatan operasi penertiban dan penjangkauan anak terlantar di lapangan, namun masih ditemukan hambatan berupa komunikasi yang belum sepenuhnya efektif. Pada aspek pelaksanaan pembinaan, kegiatan telah dilakukan melalui penyaluran ke panti sosial serta pembinaan awal, tetapi belum berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, pada aspek sumber daya, keterbatasan personel serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama dalam mendukung efektivitas sinergitas antarinstansi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur belum optimal.
Kata Kunci: Anak Terlantar; Dinas Sosial; Sinergitas; Satuan Polisi Pamong Praja; Tata Tertib Umum.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan anak merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak terlantar. Sejalan dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk bagi anak terlantar. Pemerintah wajib melaksanakan upaya terpadu melalui rehabilitasi sosial, pelayanan dasar, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak anak (Sulistiyono et al, 2025).

Dalam praktiknya masih terdapat permasalahan sosial berupa keberadaan anak terlantar di ruang publik, khususnya di wilayah perkotaan. Anak terlantar umumnya hidup dalam kondisi rentan, tidak mendapatkan pengasuhan yang layak, bahkan sebagian harus bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum di ruang publik (Azhar et al, 2026). Fenomena anak terlantar

juga berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan yang kompleks. UNICEF mencatat bahwa secara global terdapat sekitar 2,7 juta anak usia 0–17 tahun yang hidup dalam pengasuhan institusional akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan kondisi sosial lainnya (Petrowski et al, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar merupakan isu sosial yang bersifat luas dan membutuhkan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, khususnya Provinsi DKI Jakarta, permasalahan anak terlantar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi dan tingkat urbanisasi yang besar, Jakarta menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kota administrasi lainnya, yaitu mencapai 3.086.712 jiwa pada tahun 2024 (BPS DKI Jakarta, 2024). Tingginya jumlah penduduk tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya potensi permasalahan sosial, termasuk keberadaan anak terlantar. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, jumlah anak terlantar dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 48 kasus, dan menurun menjadi 38 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah (Tarjo et al,2022).

Penanganan anak terlantar di wilayah perkotaan melibatkan dua instansi utama, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial (Brindhadevi et al,2023). Satpol PP memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk melakukan penertiban terhadap anak terlantar di ruang publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Setelah proses penertiban, anak-anak tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial (Murphy,2023). Sementara itu, Dinas Sosial memiliki peran dalam melakukan asesmen, pendataan, pembinaan, serta penempatan anak ke dalam lembaga kesejahteraan sosial atau panti sosial sesuai dengan kebutuhan mereka (Garkisch & Goldkind, 2025). Dengan demikian, penanganan anak terlantar memerlukan sinergitas yang baik antara kedua instansi agar proses penanganan tidak hanya berhenti pada penertiban, tetapi juga berlanjut pada pembinaan yang berkelanjutan (Majumdar & Sarkar,2025).

Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dalam sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial. Kendala tersebut antara lain keterbatasan koordinasi, belum optimalnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, proses pembinaan lanjutan juga belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan sehingga berpotensi menyebabkan anak kembali ke lingkungan jalanan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur".

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan yang masih belum optimalnya sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Kondisi tersebut terlihat dari adanya keterbatasan koordinasi antarinstansi, belum efektifnya komunikasi dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan

sarana prasarana yang mendukung proses pembinaan secara berkelanjutan. Padahal, penanganan anak terlantar merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan ketertiban umum sekaligus perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar di wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta Timur. Salah satunya adalah faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan anak harus terlibat dalam aktivitas di jalanan seperti mengemis, mengamen, atau bekerja di sektor informal untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan aspek penertiban, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi yang lebih kompleks.

Selain itu, keterbatasan dalam sistem pembinaan dan rehabilitasi sosial juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Satpol PP sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah memiliki fokus pada penertiban dan pengamanan anak terlantar di ruang publik, sedangkan Dinas Sosial bertanggung jawab dalam proses pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Namun dalam praktiknya, alur koordinasi antara kedua instansi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan berkesinambungan, sehingga proses penanganan sering kali berhenti pada tahap penertiban saja. Permasalahan lainnya adalah masih adanya anak terlantar yang kembali ke jalan setelah dilakukan penjangkauan dan pembinaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta lemahnya sistem pendampingan lanjutan di masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas panti sosial dan sumber daya pendukung turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembinaan.

Meskipun berbagai studi telah membahas permasalahan anak terlantar dari aspek sosial dan kebijakan penanganannya, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas kelembagaan antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam proses pembinaan anak terlantar, khususnya dalam konteks koordinasi, pelaksanaan tugas di lapangan, serta keberlanjutan program rehabilitasi sosial di Kota Jakarta Timur.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik khususnya terkait kolaborasi antarinstansi dalam penanganan masalah sosial perkotaan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penyelenggaraan ketertiban umum. Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi bagi pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak terlantar. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memperkuat koordinasi, komunikasi, serta mekanisme kerja sama antara Satpol PP dan Dinas Sosial agar proses penanganan tidak hanya berhenti pada tahap penertiban, tetapi juga berlanjut pada pembinaan dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat masih ditemukannya berbagai kendala di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta belum optimalnya kesinambungan program pembinaan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan berpotensi tidak memiliki gambaran empiris yang komprehensif mengenai pola sinergitas kedua instansi tersebut dalam penanganan anak terlantar. Kondisi ini dapat menyebabkan kebijakan yang dirumuskan kurang tepat sasaran, terutama dalam memperkuat integrasi kerja antarinstansi.

Akibatnya, upaya penanganan anak terlantar di Kota Jakarta Timur berisiko berjalan kurang efektif, tidak berkelanjutan, serta tidak mampu menyentuh akar permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian sinergitas antarinstansi pemerintah dalam penanganan masalah sosial, khususnya terkait penertiban dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak terlantar, gelandangan, dan pengemis. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu sinergitas kelembagaan menjadi aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah. Darmayanti & Kurniawan (2022) mengkaji dinamika pelaksanaan kebijakan pelayanan PMKS anak jalanan di Jakarta Utara dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan anak jalanan. Rachmawati & Faedlulloh (2021) membahas implementasi program kesejahteraan sosial anak jalanan di Jakarta Timur dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn serta metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berupaya memenuhi hak dasar anak, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Syawal (2023) meneliti sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam perlindungan PMKS di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Najiyati dan Rahmat serta metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kedua instansi telah berjalan, namun belum optimal dalam aspek koordinasi dan keberlanjutan program. Fekamahsa dan Effendy (2024) juga meneliti sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan orang terlantar di Kabupaten Temanggung dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas telah dilakukan melalui penertiban dan penanganan di lapangan, namun masih terdapat kendala dalam tindak lanjut pembinaan. Ma'ruf (2025) mengkaji sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Payakumbuh dengan menggunakan teori Doctoroff dan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kedua instansi berperan penting dalam proses penertiban, namun masih diperlukan penguatan koordinasi dalam aspek pembinaan lanjutan. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS telah banyak dilakukan dengan berbagai konteks wilayah dan pendekatan teori. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus membahas sinergitas kedua instansi dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur, terutama yang menitikberatkan pada aspek koordinasi, pelaksanaan tugas, serta keberlanjutan pembinaan sosial secara terpadu.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan tersebut terletak pada fokus kajian yang secara spesifik membahas sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur, di mana konteks wilayah ini memiliki karakteristik permasalahan sosial yang kompleks sebagai daerah dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi DKI Jakarta serta tingginya mobilitas penduduk urban. Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek penertiban atau perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara

umum. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial anak terlantar sebagai bagian dari keberlanjutan proses penanganan, bukan hanya pada tahap penertiban semata.

Dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori sinergitas dari Doctoroff yang menekankan pada aspek koordinasi, komunikasi, serta sumber daya dalam kerja sama antarinstansi. Penggunaan teori ini memberikan sudut pandang yang lebih terstruktur dalam menganalisis hubungan kerja antara Satpol PP dan Dinas Sosial dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan teori implementasi kebijakan atau sinergitas secara umum. Selanjutnya, dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap proses sinergitas di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerja sama antarinstansi dalam pembinaan anak terlantar. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara fokus objek penelitian yang lebih spesifik (anak terlantar di Jakarta Timur), penggunaan teori Doctoroff dalam analisis sinergitas, serta penekanan pada aspek pembinaan berkelanjutan yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar di Kota Jakarta Timur. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan sinergitas antarinstansi tidak dapat diukur secara angka semata, melainkan perlu dipahami melalui proses, interaksi, koordinasi, serta pengalaman para pelaksana di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai paling tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara alami (natural setting) tanpa adanya manipulasi variabel. Selain itu, pendekatan ini mampu menjelaskan dinamika kerja sama antarinstansi dalam proses penertiban hingga pembinaan anak terlantar secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi, serta regulasi yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, karena keduanya memiliki kewenangan utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanganan anak terlantar.

Selain itu, informan pendukung terdiri dari pejabat teknis dan pelaksana lapangan yang terlibat langsung dalam proses penanganan, seperti bidang ketertiban umum Satpol PP, bidang rehabilitasi sosial

Dinas Sosial, UPT rumah singgah, serta pekerja sosial. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang utuh dari aspek kebijakan, pelaksanaan, dan implementasi di lapangan sehingga gambaran sinergitas dapat dianalisis secara menyeluruh. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari Satpol PP, Dinas Sosial, dan pelaksana lapangan, serta triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu juga dilakukan member check, yaitu pengecekan kembali data kepada informan untuk memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi sebenarnya.

Sementara itu, dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit trail, yaitu pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri kembali. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dan diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jakarta Timur, dengan fokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur dan Dinas Sosial Kota Jakarta Timur sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya kompleksitas permasalahan anak terlantar di wilayah perkotaan serta pentingnya koordinasi antarinstansi dalam penanganannya. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada Maret hingga April 2026, yang meliputi kegiatan observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual dan mendalam mengenai sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar di Kota Jakarta Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur. Hasil penelitian diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan terkait. Pembahasan disusun berdasarkan fokus penelitian dan dianalisis menggunakan teori sinergitas Doctoroff yang meliputi komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sinergitas kedua instansi dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur.

3.1. Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Terlantar di Kota Jakarta Timur

Pada Bab ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Jakarta Timur dalam pembinaan anak terlantar. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dari kedua instansi, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi kegiatan penanganan anak terlantar di wilayah Jakarta Timur.

Sinergi, menurut Iversen (1997), adalah proses di mana tujuan dan kegiatan organisasi digabungkan untuk mencapai sasaran dengan cara yang efisien dan efektif. Covey (Rakamdani, 2019) berpendapat bahwa sinergitas adalah hubungan komunikasi yang kuat yang dibangun melalui integrasi dan kerja sama yang kokoh di antara individu dalam kelompok atau organisasi. Selain itu, sinergitas dapat diartikan sebagai interaksi antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan efek yang lebih signifikan dibandingkan jika mereka bekerja secara terpisah (G. P. Handoko, 2017). Deardoff dan Williams (dalam Handoko, 2017:30) menjelaskan bahwa sinergitas dapat memperbesar pengaruh dan memungkinkan peningkatan energi individu melalui kerjasama. Thoby Mutis (Rahmawati, 2014) menyebut sinergitas sebagai kombinasi beberapa elemen yang menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan upaya individual. Sinergitas terbentuk dari interaksi yang menciptakan keseimbangan, integrasi, dan keharmonisan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Menurut Najiyati dan Rahmat (2011), sinergi adalah kerja sama antara beberapa pihak untuk meraih hasil yang lebih besar dan lebih baik. Penelitian ini merujuk pada teori Sinergitas Doctoroff (1977) yang menggambarkan sinergitas dalam empat dimensi, yaitu komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas.

3.1.1 Komunikasi

Doctoroff menyatakan agar komunikasi efektif setiap komunikator harus menyelaraskan tujuannnya dengan tujuan orang lain yang terlibat dalam pertukaran, maka dapat disimpulkan komunikasi merupakan proses tindakan ingin mencapai sesuatu ketika terlibat dalam pertukaran verbal. Berdasarkan hasil penelitian, proses sinergitas diawali dari kegiatan penjangkauan oleh Satpol PP melalui patroli rutin maupun laporan masyarakat. Ketika ditemukan anak terlantar, petugas Satpol PP melakukan pendataan awal dan menghubungi Dinas Sosial untuk tindak lanjut. Informasi yang disampaikan umumnya mencakup lokasi kejadian, kondisi anak, serta dokumentasi lapangan. Dinas Sosial kemudian melakukan respons dengan menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses asesmen untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai, baik melalui penempatan di panti sosial maupun pendekatan keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi telah berjalan cukup baik, baik melalui jalur formal seperti surat tugas dan laporan kegiatan, maupun jalur informal seperti grup WhatsApp koordinasi dan komunikasi langsung di lapangan. Kepala Dinas Sosial Jakarta Timur menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup jelas, terutama dalam memberikan informasi awal terkait kondisi anak di lapangan, sehingga memudahkan proses tindak lanjut. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi data dan pembaruan informasi agar koordinasi dapat berjalan lebih optimal.

3.1.2 Umpan Balik

Selain komunikasi, bentuk sinergitas juga terlihat dari adanya kepercayaan antarinstansi dalam menjalankan tugas masing-masing. Menurut Doctoroff, saling berkaitan dengan umpan balik. Umpan balik yang cepat dianalogikan Doctoroff seperti sebuah piano. Respon yang diterima oleh pengirim dari penerima pesan merupakan reaksi terhadap informasi yang telah disampaikan, terkait hasil dari proses komunikasi untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi, menjelaskan bahwa umpan balik atau feedback adalah balasan yang diberikan oleh penerima pesan atau komunikan kepada pengirim pesan atau komunikator/sumber pesan. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah dengan membangun kepercayaan kerja melibatkan keyakinan terhadap kemampuan professional seseorang. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, respon menindaklajuti laporan antara Satpol PP dan Dinas Sosial di Jakarta Timur berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Sosial setelah menerima laporan

dari Satpol PP terkait penemuan anak terlantar di lapangan. Informasi yang disampaikan aspek respon terhadap pesan menunjukkan bahwa kedua instansi telah memberikan tanggapan terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Setelah Satpol PP melakukan penjangkauan dan menginformasikan segera untuk disampaikan kepada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti.

3.1.3 Kepercayaan

Menurut Doctoroff, saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah dengan membangun kepercayaan kerja melibatkan keyakinan terhadap kemampuan professional seseorang. Untuk membangun kepercayaan dalam suatu organisasi, diperlukan tindakan nyata yang jelas dan terbuka antara individu atau kelompok di dalam organisasi tersebut.Untuk membangun kepercayaan dalam suatu organisasi, diperlukan Tindakan nyata yang jelas dan terbuka antara individu atau kelompok di dalam organisasi tersebut. Satpol PP mempercayai kemampuan Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial, sedangkan Dinas Sosial mempercayai bahwa Satpol PP mampu melakukan penjangkauan secara cepat dan humanis di lapangan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa masing-masing instansi telah memahami tugas dan fungsinya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kerja. Dari sisi pelaksanaan, hasil observasi menunjukkan bahwa sinergitas di lapangan berjalan secara responsif, bukan berdasarkan jadwal rutin yang tetap. Artinya, keandalan mitra kerja antara Satpol PP dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Jakarta Timur dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui konsistensi pelaksanaan tugas, kejelasan pembagian peran, serta kemampuan masing-masing instansi dalam menjalankan fungsi sesuai kewenangannya. Keandalan ini menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat sinergitas antarinstansi dalam penanganan anak terlantar.

3.1.4 Kreativitas

Doctoroff menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kreativitas. Doctoroff juga menjabarkan proses sebuah kreativitas yaitu pengenalan masalah, pengumpulan informasi, lalu yang terakhir adalah proses inkubasi. Proses inkubasi ini maksudnya adalah menunggu lahirnya sebuah ide. Kreativitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial terlihat dari adanya inovasi dalam pelaksanaan penjangkauan anak terlantar. Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menggunakan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis agar anak terlantar bersedia mendapatkan pembinaan. Pendekatan ini menjadi bentuk inovasi dalam mengubah metode kerja yang sebelumnya cenderung represif. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP masih menjalankan fungsi utama sebagai pelaksana penjangkauan dan penertiban anak terlantar di lapangan. Sementara itu, Dinas Sosial tetap berperan dalam melakukan asesmen dan pembinaan lanjutan melalui panti sosial. Pola kerja ini pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang mendasar, melainkan hanya mengalami penyesuaian dalam hal teknis pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penerapan ide baru juga terlihat dari penggunaan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan anak terlantar. Meskipun pendekatan ini bukan merupakan hal yang sepenuhnya baru, namun terdapat upaya untuk lebih mengedepankan komunikasi persuasif dibandingkan tindakan represif. Kreativitas juga terlihat dari kemampuan adaptasi terhadap kondisi lapangan yang tidak menentu. Tidak semua anak terlantar dapat ditangani dengan cara yang sama, sehingga diperlukan penyesuaian strategi berdasarkan kondisi masing-masing anak. Dalam beberapa kasus, anak tidak langsung ditempatkan di panti sosial, tetapi dikembalikan kepada keluarga.

Tabel 1.
Tahapan Penertiban dan Pembinaan Anak yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial

Tahapan Operasional	Bentuk Sinergitas	Kegiatan yang Dilakukan	Tujuan Utama
1.Pra -Penertiban	Rapat koordinasi pemetaan wilayah	Memetakan titik rawan dan briefing pembagian tugas di lapangan.	Menyamakan persepsi antarinstansi.
2.Pelaksanaan Penertiban (*Outreach*)	Komunikasi intensif secara langsung di lapangan dan patroli gabungan terdepan.	Melakukan patroli bersama dan mengamankan anak terlantar secara humanis tanpa kekerasan.	Menjaga kelancaran pelaksanaan penertiban, menegakkan Perda Ketertiban Umum
3. Penerimaan & Identifikasi Awal	Serah terima resmi hasil penertiban dari petugas lapangan ke pihak panti sosial.	**Penerimaan:** Melakukan proses administrasi serah terima anak dari Satpol PP ke pihak panti. **Identifikasi Awal:** Melakukan pencatatan biodata, asesmen kebutuhan dasar, serta *home visit* (kunjungan rumah) ke keluarga anak.	Memvalidasi status hukum anak terlantar, mengetahui latar belakang masalah keluarga, serta menentukan intervensi rehabilitasi yang tepat.
4. Pelayanan & Pembinaan Sosial di Panti	Kolaborasi program pemulihan hak anak dan rehabilitasi terpadu di dalam lingkungan panti.	**Pelayanan Sosial:** Penyediaan makanan bergizi, pakaian (sandang), dan sebagainya **Pembinaan Sosial:** Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, sosial, dan lainnya.	Memulihkan kondisi trauma psikologis dan fisik anak, memberikan hak pendidikan , pelatihan keterampilan hidup mandiri.
5. Terminasi	Penutupan kasus secara administratif dan berkas legal formal.	Mengakhiri pelayanan panti secara resmi setelah anak dinilai benar-benar mandiri atau telah sukses berintegrasi kembali dengan keluarganya secara permanen.	Menyatakan bahwa seluruh proses pembinaan,pengawasan, dan tanggung jawab pelayanan sosial terhadap anak tersebut telah selesai secara hukum.

Sumber : Diolah oleh penulis 2026

Setelah proses penjangkauan, Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap kondisi anak melalui proses asesmen sosial. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan lebih lanjut. Anak yang masih memiliki keluarga dapat dikembalikan melalui pendekatan reintegrasi keluarga, sedangkan anak yang tidak memungkinkan akan ditempatkan di panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur menunjukkan bahwa kerja sama lintas instansi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan penanganan masalah sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas telah berjalan melalui beberapa bentuk utama, yaitu penjangkauan oleh Satpol PP, asesmen dan pembinaan oleh Dinas Sosial, serta dukungan lembaga panti sosial sebagai tempat rehabilitasi anak (Hasan & Eviany,2014). Namun demikian, efektivitas sinergitas tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti keterbatasan SDM, adaptasi anak, serta stigma masyarakat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan anak terlantar. Sama halnya dengan temuan Ismail et al (2026) yang menyatakan bahwa koordinasi yang terstruktur dan komunikasi yang jelas antar lembaga pemerintah akan meningkatkan efektivitas program sosial, khususnya dalam penanganan PMKS. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial sudah berjalan melalui media formal seperti surat dan SOP, serta media informal seperti grup WhatsApp, sehingga mempercepat respon penanganan di lapangan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa respon cepat dan pembagian peran yang jelas antara Satpol PP dan Dinas Sosial sangat menentukan keberhasilan proses pembinaan anak terlantar. Sama halnya dengan penelitian Wahab (2026) yang menemukan bahwa efektivitas penanganan anak terlantar sangat dipengaruhi oleh kecepatan respon instansi serta kejelasan pembagian tugas di lapangan. Satpol PP berperan dalam penjangkauan dan penertiban, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam rehabilitasi sosial, sehingga sinergitas berjalan secara saling melengkapi. Namun demikian, berbeda dengan temuan Rahmawati et al (2025) yang menyatakan bahwa implementasi SOP yang konsisten dapat menciptakan koordinasi yang sangat stabil dan minim hambatan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa meskipun SOP sudah tersedia, pelaksanaannya masih bersifat situasional terutama pada kegiatan patroli bersama yang belum terjadwal secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi implementasi di lapangan masih menjadi tantangan dalam sinergitas kedua instansi (Madjid,2024).

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan panti sosial memiliki peran penting sebagai jembatan dalam proses rehabilitasi anak terlantar. Sama halnya dengan temuan Kurniasih et al. (2025) yang menekankan bahwa lembaga berbasis komunitas dan pelayanan sosial dapat membantu proses perubahan perilaku individu melalui pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, panti sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan yang mencakup pendidikan, keterampilan, dan rehabilitasi psikososial. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan humanis dalam proses pembinaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi anak terlantar (Madjid et al,2024). Sama halnya dengan temuan Winoto (2026) yang menyatakan bahwa pendekatan yang terlalu kaku dalam penanganan kelompok rentan seringkali tidak efektif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan adaptif. Dalam penelitian ini, Satpol PP mulai mengubah pendekatan dari represif menjadi lebih humanis, seperti pendekatan komunikasi langsung kepada anak sebelum penjangkauan dilakukan.

Namun berbeda dengan penelitian Hermawan (2025) yang lebih menekankan pada peran komunitas pemuda dalam pemberdayaan berbasis literasi yang bersifat sukarela dan terstruktur, dalam penelitian ini sinergitas antarinstansi masih sangat bergantung pada struktur birokrasi pemerintah. Partisipasi masyarakat dan komunitas dalam pembinaan anak terlantar belum sepenuhnya terlibat secara aktif, sehingga peran masyarakat masih terbatas pada dukungan tidak langsung. Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap anak terlantar masih menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial (Eviany & Sutiyo,2023). Sama halnya dengan penelitian Gobai et al (2025) yang menyatakan bahwa faktor sosial dan pendidikan sangat memengaruhi

keberhasilan program pemberdayaan, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap anak panti dapat menghambat proses penerimaan kembali anak ke lingkungan sosial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan pendekatan humanis dalam penanganan masalah sosial. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan konteks, terutama pada aspek implementasi di lapangan yang masih menghadapi kendala struktural dan sosial. Oleh karena itu, sinergitas antara Satpol PP dan Dinas Sosial perlu terus diperkuat tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada aspek operasional dan dukungan masyarakat agar pembinaan anak terlantar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur, penelitian ini juga menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Temuan pertama adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Sosial yang berperan sebagai faktor penghambat dalam proses pembinaan anak terlantar. Ketimpangan jumlah personel antara Satpol PP dan Dinas Sosial menyebabkan proses tindak lanjut dari hasil penjangkauan tidak selalu dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya proses asesmen, rehabilitasi, dan monitoring terhadap anak terlantar yang telah dijangkau di lapangan. Temuan kedua adalah adanya ketidakmampuan sebagian anak terlantar dalam beradaptasi terhadap sistem pembinaan di panti sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua anak mampu mengikuti aturan dan pola kehidupan yang terstruktur di panti, sehingga sebagian memilih untuk meninggalkan panti sebelum proses pembinaan selesai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam memastikan keberlanjutan proses rehabilitasi sosial, serta menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan masih perlu disesuaikan dengan kondisi psikologis dan latar belakang anak. Temuan menarik lainnya adalah masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak terlantar yang berada di panti sosial. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa anak panti berasal dari keluarga bermasalah atau tidak memiliki latar belakang sosial yang baik. Stigma ini berdampak pada proses reintegrasi sosial anak setelah keluar dari panti, karena mereka masih menghadapi hambatan dalam penerimaan sosial di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dari masyarakat masih menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya jadwal patroli bersama yang terstruktur antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi salah satu kendala operasional di lapangan. Pelaksanaan penjangkauan anak terlantar masih bersifat situasional, sehingga koordinasi tidak selalu berjalan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antarinstansi sudah terjalin, aspek perencanaan kegiatan bersama masih perlu ditingkatkan agar sinergitas dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Jakarta Timur telah berjalan melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Satpol PP berperan dalam penjangkauan dan penertiban anak terlantar di ruang publik, sedangkan Dinas Sosial melanjutkan melalui proses asesmen, pembinaan, dan rehabilitasi sosial di panti sosial. Selain itu, sinergitas kedua instansi juga ditunjang oleh komunikasi

dan koordinasi yang dilakukan melalui rapat, laporan lapangan, serta komunikasi langsung saat penanganan kasus. Mekanisme komunikasi tersebut memungkinkan setiap tindakan yang dilakukan di lapangan menjadi lebih terarah, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan penanganan anak terlantar. Selanjutnya, proses umpan balik antara Satpol PP dan Dinas Sosial turut berperan dalam memperkuat efektivitas kerja sama. Satpol PP menyampaikan hasil penjangkauan di lapangan, sementara Dinas Sosial memberikan tindak lanjut berupa pembinaan dan rekomendasi penanganan. Hal ini membuat proses penanganan anak terlantar dapat berjalan lebih adaptif dan berkelanjutan. Kemudian, sinergitas juga diperkuat oleh adanya kepercayaan antar lembaga berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing. Satpol PP fokus pada aspek ketertiban umum, sedangkan Dinas Sosial fokus pada aspek rehabilitasi sosial. Kepercayaan ini mendorong kerja sama yang lebih stabil dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Terakhir, kreativitas dalam pelaksanaan pembinaan terlihat dari penggunaan pendekatan humanis serta inovasi dalam mekanisme penanganan, mulai dari proses penjangkauan, asesmen, hingga penempatan di panti sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkembang dalam bentuk inovasi pelayanan sosial yang lebih responsif terhadap kondisi anak terlantar di lapangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu, tenaga, dan biaya penelitian sehingga proses penggalian data belum dapat dilakukan secara lebih luas dan mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu wilayah studi kasus, yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan kondisi sinergitas Satpol PP dan Dinas Sosial pada konteks wilayah tersebut. Pemilihan studi kasus ini mengacu pada pendekatan penelitian kualitatif Creswell yang menekankan pendalaman pada satu lokasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas pada konteks lokasi yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada wilayah lain atau kota lain yang memiliki karakteristik serupa dalam penanganan anak terlantar, sehingga dapat dilakukan perbandingan pola sinergitas antar daerah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan fokus kajian pada efektivitas kebijakan, model koordinasi lintas instansi, serta peran masyarakat dalam mendukung pembinaan anak terlantar agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur dan Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan serta dukungan selama proses penelitian berlangsung. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak panti sosial, khususnya PSAA Putra Utama 3, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alaslan, A., & Saumlaki, J. (2022). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Pendekatan Kualitatif dan Konstruksi Paradigma Baru*. IPDN Press.https://eprints.ipdn.ac.id/8421/

Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 8(2), https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=3dDSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=Pengantar+Ilmu+Politik+dan+Ruang+Lingkupnya+E+Eviany&ots=WkpziAqlbl&sig=-VwyXrxPFEsy9KLTUh-fIYvgjXo

Labolo, F. (2014). Memahami Kembali Hakikat Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(1), 1–12. https://ejournal.ipdn.ac.id/jkp/article/view/122

Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Remaja Rosdakarya

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta. https://eprints.ipdn.ac.id/3105/

Huxham, C., & Vangen, S. (2000). Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (Not Quite) Joined-Up World. *Academy of Management Journal*, 43(6), 1159–1175. https://doi.org/10.5465/1556343

Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The Discipline of Teams. *Harvard Business Review*, 71(2), 111–120. https://hbr.org/1993/03/the-discipline-of-teams-2

Petrowski, N., Cappa, C., & Gross, P. (2017). Estimating the Number of Children in Institutional Care Globally: A Systematic Review. *The Lancet Global Health*, 5(5), e477–e484. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416302873

Roussau, K. (2016). Organizational Synergy and Inter-Agency Coordination in Social Welfare Management. *International Journal of Public Administration*, 39(11), 845–856. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1057852

Brindhadevi, K., Barceló, D., Chi, N. T. L., & Rene, E. R. (2023). E-waste management, treatment options and the impact of heavy metal extraction from e-waste on human health: Scenario in Vietnam and other countries. *Environmental research*, *217*, 114926. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935122022538

Doctoroff, M. (1977). *Synergistic Management: Creating the Whole from the Parts*. American Management Association. https://archive.org/details/synergisticmanag0000doct

Lestari, P. (2021). Dampak Keberadaan Anak Jalanan terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pusat Perkotaan. *Jurnal Ketertiban Publik*, 5(2), 78–92. https://doi.org/10.21831/jkp.v5i2.4112

Azhar, S. H. I., Ananda, H. F., & Nasution, Z. (2026). *Perlindungan anak dan bahaya narkoba dalam lingkungan keluarga*. Merdeka Kreasi Group. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=D-vHEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kondisi+ini+tidak+hanya+berdampak+pada+tidak+terpenuhinya+hak+anak,+tetapi+juga+berpotensi+mengganggu+ketertiban+umum+di+ruang+publik+(Lestari,+2021).+&ots=wzlPYDkKK4&sig=_Fe1C8hXZdHvFnRR9kk-w38POz0

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2024*. https://jakarta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/baae7b80d16101c7bef30cc0/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2024.html

Darmayanthi, N. P. R., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Anak Jalanan (Studi Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur). *Publika*, 1-14. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/43482

Garkisch, M., & Goldkind, L. (2025). Considering a unified model of artificial intelligence enhanced social work: A systematic review: M. Garkisch and L. Goldkind. *Journal of Human Rights and Social Work*, *10*(1), 23-42. https://link.springer.com/article/10.1007/s41134-024-00326-y

Gobai, S., Todingbua, M. A., & Rantererung, C. L. (2025). Evaluasi Manajemen Prosedur Penanganan Anak Terlantar di Panti Asuhan SiloamKabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 120-127. http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/885

Hasan, E., & Eviany, E. (2014). Komunikasi Dalam Koordinasi Pemerintahan.

Hermawan, H. (2025). *Komunitas Informasi Masyarakat, Kebijakan, dan Tantangannya*. CV Eureka Media Aksara.

Ismail, N., Maghfira, A., Alwi, A., & Salim, I. (2026). Public Social Partnership dalam Governansi Program Rumah Perlindungan: Sebuah Analisis Empiris di Kota Makassar. *Journal of Humanity and Social Justice*, 95-113. https://ojs.isjn.or.id/index.php/jhsj/article/view/102

Kurniasih, N., Achmad, W., Aulia, S., & Rifqi, F. (2025). Penguatan kompetensi pekerja sosial dalam program rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) untuk lansia terlantar di kelurahan Cigadung kota Bandung. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(01), 42-50. https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/view/7174

Majumdar, P., & Sarkar, A. K. (2025). Family Centered approach to Child protection services in India: Future scope for non-governmental organizations to prevent child maltreatment. *Child Protection and Practice*, *5*, 100157. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950193825000646

Murphy, C. (2023). A more 'child-centred'system? The discretionary spaces of the child protection social worker. *Journal of Social Work Practice*, *37*(1), 3-16. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650533.2022.2031935

Rahmawati, A. P., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja Pada PT XLSmart. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(5), 201-207. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/4656

Sulistiyono, S. T., Hattori, M., Rochwulaningsih, Y., Matsumoto, A., Masruroh, N. N., & Widisuseno, I. (2025). The dynamics of state-market relations in the quest for world-class universities in Indonesia. *Discover Sustainability*, *6*(1), 864. https://link.springer.com/article/10.1007/s43621-025-01635-6

Tarjo, T., Vidyantha, H. V., Anggono, A., Yuliana, R., & Musyarofah, S. (2022). The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government. *Cogent Economics & Finance*, *10*(1), 2101222. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2022.2101222

Winoto, S. (2026). *Adaptive Governance dalam Transisi Pandemi Menuju Endemi*. Universitas Brawijaya Press.